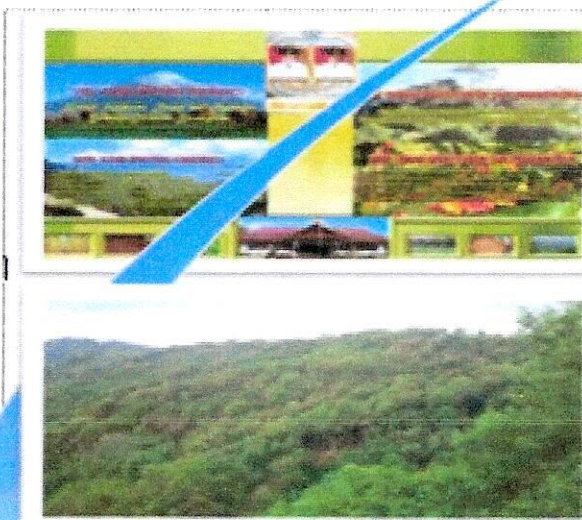




RENCANA KERJA (RENJA 2024)

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SUNGAI PENUH**



Jln. Gajah Mada Komplek Kantor Walikota Sungai Penuh No. 01

Telpon ☎ 0748 - 323454 Fax ✉ : 0748-323454

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas Karunia dan Ridha-Nya Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Tahun 2024 telah selesai disusun. Renja yang merupakan dokumen perencanaan satu tahunan ini menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh Tahun 2024.

Perwujudan konsep pembangunan sektor Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia/Aparatur yang efektif dan efisien menemui banyak tantangan, peluang dan kendala antara lain berupa perubahan lingkungan strategis yang dinamis, perubahan kondisi sosial politik dan keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan proses penyusunan konsep pembangunan yang perlu terus ditingkatkan.

Perencanaan merupakan salah satu bagian penting untuk mencapai pembangunan yang efektif dan efisien. Perencanaan yang baik dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dengan tujuan/hasil yang ingin dicapai. Rencana Kerja (Renja – SKPD) merupakan salah satu proses dalam perencanaan pembangunan seperti yang telah diamanatkan Undang – Undang. Renja - SKPD ini memuat program/kegiatan prioritas, arah dan kebijakan pembangunan, tujuan dan sasaran yang dicapai hingga kebijakan pendanaan serta permasalahan yang akan dihadapi.

Semoga dengan telah tersusunnya Renja SKPD ini harapan tercapainya pembangunan yang efektif dan efisien khususnya sektor Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia/Aparatur. Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh Tahun 2024.

Sungai Penuh, 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SUNGAI PENUH

NINA PASTIAN, S.Sos., M.Si

Pembina

NIP. 19760831 200604 2 011

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2022	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	21
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Daerah	36
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	37
3.3. Program dan Kegiatan	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD	45
BAB V PENUTUP	61

BAB I PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Sektor Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah banyak berperan dalam pencapaian sasaran pembangunan serta pertumbuhan perekonomian Kota Sungai Penuh pada tahun-tahun sebelumnya, namun demikian peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan di lingkungan internal maupun eksternal, BKPSDM selalu melakukan perubahan-perubahan (menambah, mengurangi, dan/atau memodifikasi) terhadap alur tata laksana yang berjalan saat ini. Alur tata laksana yang efektif dan efisien merupakan tantangan besar karena perubahan-perubahan tersebut berkaitan erat dengan setiap elemen yang ada di BKPSDM Kota Sungai Penuh.

Pemerintah telah berupaya menangani permasalahan dibidang birokrasi kepegawaian antara lain menetapkan kebijakan Pemantapan Kelembagaan dan ketatausahaan, pengembangan sistem dan manajemen kepegawaian, pengembangan sistem dan manajemen diklat, pengembangan sarana dan prasarana, pendayagunaan dan pengembangan Sumberdaya Organisasi, Pendayagunaan pembiayaan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Pemerintah Kota Sungai Penuh telah mengeluarkan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh, bahwa kedudukan BKPSDM adalah Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan, merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian yang di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian.

Dalam pelaksanaan Tupoksi tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh mempunyai kewenangan tentang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh, penyusunan program dan tugas lainnya yang diserahkan Kepala daerah di Bidang Kepegawaian yang dituangkan dalam **RENCANA KERJA TAHUNAN** untuk 1 (Satu) tahun kegiatan.

Agenda pembangunan Kepegawaian diarahkan pada perwujudan Pelaksanaan VISI dan MISI Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh yaitu 2021-2026: **"TERWUJUDNYA KOTA SUNGAI PENUH MENJADI KOTA PENDIDIKAN, BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN YANG MANDIRI, MASYARAKAT YANG RELIGIUS, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DENGAN SLOGAN "MAJU DAN BERKEADILAN".** Dengan perincian sebagai berikut:

Pendidikan : Diartikan bahwa Kota Sungai Penuh diharapkan menjadi pusat pendidikan yang berkualitas, maju dan mandiri berwawasan lingkungan dan bertaraf Internasional sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, kreatif, inovatif, tangguh menghadapi tantangan dan berguna bagi bangsa dan masyarakat.

Ekonomi Kerakyatan yang mandiri : Diartikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat meliputi berbagai bidang usaha kecil dan menengah, jasa, perdagangan, koperasi, home industri dan sektor ekonomi lainnya serta menggali sumber daya yang ada, sehingga terwujud masyarakat yang dapat hidup layak baik secara fisik maupun non fisik.

Religius : Diartikan bahwa masyarakat Kota Sungai Penuh di harapkan memiliki tingkat pemahaman dan pengalaman nilai-nilai agama secara nyata, baik dan benar sehingga tercermin dalam pola pikir, bertingkah laku dan kehidupan bermasyarakat sebagai pencitraan diri sesuai dengan nilai-nilai agama yang diyakininya.

Budaya : Diartikan bahwa masyarakat Kota Sungai Penuh adalah masyarakat yang beradat, memiliki corak budaya yang beraneka ragam dan berbagai suku akan dibina menjadi khasanah kekayaan. budaya Kota Sungai Penuh sehingga menjadi aset wisata di Propinsi Jambi.

Sejahtera : Diartikan bahwa masyarakat Kota Sungai Penuh Memiliki rata-rata tingkat pendapatan yang memadai, tingkat pendidikan yang cukup dan derajat kesejahteraan yang baik, sehingga dapat hidup layak, aman dan tentram.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, BKPSDM Kota Sungai Penuh berperan dalam meningkatkan “**SEJAHTERA**” Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur, pelayanan administrasi kepegawaian dan penegakan peraturan aparatur sehingga aparatur dapat bekerja secara optimal dalam melayani masyarakat.

Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi.

Adapun misi yang akan ditempuh untuk mencapai visi tersebut adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter tinggi, berbasis nilai agama dan budaya;
2. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan Kota Sungai Penuh yang baik, mandiri dan bebas KKN;
3. Pemantapan struktur perekonomian masyarakat dalam pengembangan potensi daerah;
4. Pemerataan dalam peningkatan sarana dan prasarana wilayah serta prasarana dasar Permukiman;
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
6. Menciptakan pelestarian lingkungan hidup;
7. Mewujudkan kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat Kota Sungai Penuh.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, BKPSDM Kota Sungai Penuh melaksanakan **misi kedua Walikota** Sungai Penuh yaitu meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN.

Langkah-langkah pelaksanaan misi dimaksud dijabarkan dalam :

1. Pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintah daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan (Diklat);
2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian;
3. Penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kepegawaian daerah;

4. Penyiapan dan perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian daerah yang meliputi pengembangan sumber daya aparatur, pengelolaan administrasi kepegawaian dan penyelenggaraan diklat pegawai;
5. Penyusunan program dan rencana kerja bidang kepegawaian daerah yang meliputi manajemen kepegawaian, sistem informasi kepegawaian serta penyelenggaraan dan pengembangan diklat;
6. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, pengangkatan, penempatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Penyiapan bahan dan koordinasi dalam rangka pengembangan karier pegawai;
8. Penyiapan bahan dan koordinasi dalam rangka pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi dan memasuki masa pensiun serta pemberian hukuman bagi pegawai yang indisipliner;
9. Penyiapan, pengkoordinasian, penyelenggaraan serta pengembangan diklat pegawai (Struktural, fungsional dan teknis substantif)
10. Pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan bidang kepegawaian daerah yang diberikan oleh Walikota.

Visi yang ingin dicapai tersebut diatas tentu saja berpedoman pada tujuan, sasaran yang akan dicapai serta program dan kegiatan yang disusun untuk 1 (satu) tahun kedepan. Adapun yang menjadi tujuan Pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Sungai Penuh 2021 – 2026 dalam hal pembangunan sektor kepegawaian adalah *"Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi"*. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan berisikan program dan kegiatan yang merupakan wujud dari pencapaian target pembangunan sektor kepegawaian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Untuk sasaran pembangunan daerah dalam sektor kepegawaian ada 2 (dua), yaitu *"Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah"* dan *"Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur"*.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh tahun 2024 berlandaskan pada :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9898, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871).
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor; 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10);
19. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 56);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Sungai Penuh Nomor 07 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Walikota Nomor 1 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023;
26. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.194/2022 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023;
27. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.195/2022 tentang Standar Biaya Umum Satuan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota untuk satu tahun mendatang. Secara Khusus Rencana Kerja ini mempunyai tujuan:

- a. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan, Renstra dan Hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota.
- b. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dan manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
- c. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota.
- d. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota serta indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun depan.
- e. Menjadi acuan program dan kegiatan bagi Bidang dan Seksi lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kota Palangka Raya Tahun 2024 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2022

Memuat pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.



- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah serta Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Daerah
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan SKPD yang sesuai dengan RPJMD 2021-2026 dan Renstra SKPD 2021-2026.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SKPD

TAHUN 2022



2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD

Secara umum dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh telah dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan ini terlihat dari capaian indikator sasaran yang mencapai target yang diharapkan. Di sisi lain, keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran tak lepas dari keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing bagian organisasi.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 mempunyai 3 Program, 13 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan yang pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 2). Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh yaitu membantu Kepala Daerah melaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian serta dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 dalam misi kedua yaitu "Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN". Bersama beberapa perangkat daerah lain yang terkait untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi, BKPSDM Kota Sungai Penuh menetapkan sasaran "Meningkatkan kapasitas dan manajemen aparatur" dengan indeks profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit sebagai Indikator Kinerja.

Adapun capaian program prioritas RPJMD 2021-2026 yang telah dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini ditunjang oleh indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;
- 2) Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
- 3) Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah;
- 4) Persentase Aparatur BKPSDM yang mengikuti diklat, sosialisasi dan bimtek;
- 5) Persentase Aparatur BKPSDM yang berkinerja baik.

Masing-masing indikator memiliki target 100%, dengan realisasi 100%.

2. Program Kepegawain Daerah

Program ini memiliki 6 indikator kinerja, yaitu :

- 1) Tingkat pelaporan kinerja ASN, target 100%; realisasi 100 %

Untuk indikator ini target pada tahun 2022 dengan persentase ASN yang berkinerja baik sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 100%. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut diatas didapatkan dengan formulasi “(Jumlah ASN yang memenuhi capaian nilai SKP bernilai minimal baik/Jumlah ASN x 100%)”. Jumlah ASN Pemerintah Kota Sungai Penuh per 31 Desember 2022 sebanyak 2.828 ASN, untuk nilai SKP minimal bernilai baik pada tahun 2022 didapatkan semua ASN memiliki nilai kinerja baik. Jika dimasukkan dalam penghitungan rumusan pencapaian target kinerja indikator, maka didapatkan sebagai berikut :

$$\frac{2.828}{2.828} \times 100 = 100\%$$

- 2) Persentase keterisian jabatan target indikator kinerja 93%, realisasi 92,91%

Untuk indikator ini target pada tahun 2022 dengan persentase ASN yang memenuhi syarat kompetensi sebesar 93%, dengan realisasi sebesar 92,91%. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut diatas didapatkan dengan rumusan “(Jumlah Jabatan yang telah diisi / Jumlah Jabatan x 100%)”. Untuk data pejabatan dapat dilihat pada table berikut :

Rekapitulasi Data Pejabat Struktural Eselon
Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh
Tahun Anggaran 2022

NO	URUTAN ESELON	TERISI	LOWONG	TOTAL
1	ESELON II. a	1	-	1
2	ESELON II. b	24	13	37
3	ESELON III. a	54	1	55
4	ESELON III. b	88	1	89
5	ESELON IV. a	145	9	154
6	ESELON IV. b	42	3	45
JUMLAH		354	27	381

Dari tabel diatas didapatkan jabatan sebanyak 381 jabatan, terisi sebanyak 354 jabatan, sehingga dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{354}{381} \times 100 = 92,91\%$$

- 3) Persentase keterpenuhan formasi ASN target indikator kinerja 82%, realisasi 82,00%.

Untuk indikator ini target pada tahun 2022 dengan persentase keterpenuhan formasi ASN sebesar 82%, dengan realisasi sebesar 81,97%. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut diatas didapatkan dengan rumusan “**(Jumlah ASN / Jumlah Formasi ASN Berdasarkan ANJAB/ABK) x 100%**”. Jumlah ASN tahun 2022 berjumlah 2828 orang, sedangkan jumlah formasi ASN berdasarkan Anjab/ABK tahun 2022 sebanyak 3.450 formasi, sehingga dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{2828}{3450} \times 100 = 81,97\%$$

- 4) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) target indikator kinerja 83%, realisasi sebesar 92,19%. Indikator kinerja ini didapatkan dengan formulasi “**Jumlah pegawai menurut pendidikan PT keatas (diluar guru dan tenaga kesehatan)/Seluruh jumlah pegawai (diluar guru dan tenaga kesehatan) x 100%**”. Dimana jumlah pegawai menurut Pendidikan PT keatas (diluar guru dan tenaga Kesehatan berjumlah 1.227 dengan jumlah seluruh pegawai diluar tenaga guru dan Kesehatan bserjumlah 1.331. sehingga didapatkan realisasi sebagai berikut :

$$\frac{1227}{1331} \times 100 = 92,19\%$$

- 5) Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) target indikator kinerja 15%, realisasi sebesar 33,36%.

Indikator kinerja ini didapatkan dengan formulasi “**Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)/Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan Tenaga kesehatan) x 100 %**”. Dimana berjumlah 444 pegawai dengan jumlah seluruh pegawai diluar tenaga guru dan Kesehatan bserjumlah 1.331 pegawai. sehingga didapatkan realisasi sebagai berikut :

$$\frac{444}{1331} \times 100 = 33,36\%$$

- 6) Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) target indikator kinerja 100%, realisasi sebesar 50,23%.

Indikator kinerja ini didapatkan dengan formulasi “**Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) / Seluruh jumlah pegawai non Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) x 100%**”. Indikator ini merupakan indikator

IKK Outcam berdasarkan Permendagri 18 tahun 2020. Untuk Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan) sebanyak 223 pegawai sementara untuk Seluruh jumlah pegawai non Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan) berjumlah 444 pegawai, sehingga didapatkan realisasi sebagai berikut :

$$\frac{223}{444} \times 100 = 50,23\%$$

Target indikator ini sebesar 100%, sementara teralisasi hanya 50, 23% hal ini disebabkan karena 221 pagawai merupakan pejabat fungsional yang disetarakan dari pejabat struktural. Dalam penyetaraan jabatan dari jabatan structural ke fungsional PNS bersangkutan tidak melewati uji kompetensi tapi diangkat langsung dalam jabatan fungsional.

3. Program Kepegawaian Daerah

Program ini memiliki indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase pegawai yang telah memenuhi kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan adapun target indikator kinerja sebesar 87% dengan realisasi sebesar 92,91%.

Adapun formulasi indikator ini yaitu “**(Jumlah ASN yang telah memenuhi kompetensi sesuai dengan prasaratan jabatan / Jumlah Pemangku jabatan) x 100%**”. Jumlah ASN yang memiliki kompetensi sesuai dengan prasyarat jabatan sebanyak 354 ASN, sedangkan jumlah jabatan sebanyak 381 jabatan. Sehingga didapatkan sebagai berikut :

$$\frac{354}{381} \times 100 = 92,91\%$$

- 2) Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan adapun target indikator kinerja sebesar 20,1 JP dengan realisasi sebesar 21 JP.

Adapun formulasi untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah “**Jumlah Total jam lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan / Jumlah Total ASN**”.

- 3) Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal adapun target indikator kinerja sebesar 5% dengan realisasi sebesar 5%.

Formulasi indikator kinerja ini adalah “**Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Formal / Jumlah Total ASN) x 100%**”. Dimana jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal sebanyak 141 ASN dengan jumlah total ASN tahun 2022 sebanyak 2828 ASN.

$$\frac{141}{2828} \times 100 = 5\%$$

- 4) Persentase Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural adapun target indikator kinerja sebesar 45% dengan realisasi sebesar 0,28%.

Adapun formulasi indikator kinerja ini adalah "**Jumlah ASN yang telah mengikuti diklat struktural / Jumlah Total jabatan) x 100%**". Pada tahun 2022 ASN yang mengikuti diklat struktural, yaitu Diklatpim III hanya diikuti oleh 1 orang dari total jumlah ASN sebanyak 354 jabatan. Sehingga didapatkan capaian realisasi indikator kinerja sebesar 0,28%.

$$\frac{1}{354} \times 100 = 0,28\%$$

Rendahnya capaian realisasi indikator kinerja disebabkan kurangnya minat ASN untuk mengikuti diklat kepemimpinan.

Dalam rangka peningkatan Upaya meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN untuk tahun yang akan datang, BKPSDM Kota Sungai Penuh akan mengupayakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengirimkan 36 (Tiga Puluh Enam) orang pejabat Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan;
2. Mendorong peningkatan kompetensi teknis melalui pelaksanaan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis secara daring/luring pada ASN Pemerintah Kota Sungai Penuh;
3. Mendorong peningkatan disiplin dan kinerja PNS Kota Sungai Penuh dengan Penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh berdasarkan Beban Kerja dengan perhitungan berdasarkan Produktivitas Kerja (60%) dan Disiplin Kerja (40%) dan dengan menerapkan aplikasi SIABON untuk absensi PNS;
4. Melaksanakan Pemutakhiran Data Mandiri ASN secara Elektronik;
5. Melaksanakan uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
6. Mendorong peningkatan Kualifikasi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui pemberian Beasiswa Tugas Belajar Strata-2 dan meningkatkan kualifikasinya melalui ijin belajar;
7. Meningkatkan kompetensi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Meningkatkan kompetensi pejabat yang telah diangkat ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme menyetaraan, dengan mengikutkan dalam diklat fungsional.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022

Kota Sungai Penuh

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11) Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja; 2) Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; 3) Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah; 4) Persentase Aparatur BKPSDM yang mengikuti diklat, sosialisasi dan bimtek; 5) Persentase Aparatur BKPSDM yang berkinerja baik	1) 100%; 2) 100%; 3) 100%; 4) 100%; 5) 100%;	1) 100%; 2) 100%; 3) 100%; 4) - 5) 100%;	1) 100%; 2) 100%; 3) 100%; 4) - 5) 100%;	1) 100%; 2) 100%; 3) 100%; 4) - 5) 100%;	1) 100%; 2) 100%; 3) 100%; 4) - 5) 100%;	1) 100%; 2) 100%; 3) 100%; 4) - 5) 100%;	100%; 4) - 5) 100%;	1) 100%; 2) 100%; 3) 100%; 4) - 5) 100%;
4 5 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi SKPD	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	100.00	48.61
4 5 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45	7	7	100		6	20	44.44
4 5 03 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	36	6	6	100		6	18	50.00
4 5 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42	7	7	100		7	21	50.00
4 5 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42	7	7	100		7	21	50.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 5 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen/ laporan keuangan	100	100	100	100	100	100	100.00	40.91
4 5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350	40	50	36	72	50	126	36.00
4 5 03 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84	12	12	12	100	12	36	42.86
4 5 03 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	84	12	12	12	100	12	36	42.86
4 5 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7	1	1	1	100	1	3	42.86
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	0	1	1	0	1	2	40.00
4 5 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat	Persentase pengadaan pakaian dinas bagi ASN dan Non ASN serta Bimtek/ Sosialisasi dan Diklat	100	100	100	100	100	100	100.00	35.71
4 5 03 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21	3	3	3	100	3	6	28.57
4 5 03 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	140	20	20	20	100	20	60	42.86
4 5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi dan persarana perkantoran	100	100	100	100	100	100	100.00	45.71
4 5 03 01 2.06 02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	119	17	17	17	100	17	51	42.86
4 5 03 01 2.06 05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	301	43	43	43	100	43	129	42.86
4 5 03 01 2.06 01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21	3	3	3	100	3	9	42.86
4 5 03 01 2.06 06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25	5	5	5	100	5	15	60.00
4 5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	21	3	3	3	100	3	9	42.86

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140	20	20	20	100	20	60	42.86
4 5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi dan Persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran	100	100	100	100	100	100	100.00	42.86
4 5 03 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	28	4	4	4	100	4	12	42.86
4 5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi dan Persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran	100	100	100	100	100	100	100.00	42.86
4 5 03 01 2.08 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	84	12	12	12	100	12	36	42.86
4 5 03 01 2.08 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	28	4	4	4	100	4	12	42.86
4 5 03 01 2.08 04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14	2	2	2	100	2	6	42.86
4 5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi dan Persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran	100	100	100	100	100	100	100.00	46.03
4 5 03 01 2.09 01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	4	5	4	80	5	4	66.67
4 5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21	3	3	3	100	3	9	42.86
4 5 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	0	1	1	100	1	2	28.57

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1) Tingkat pelaporan Kinerja ASN; 2) Persentase keterisian jabatan; 3) Persentase keterpenuhan formasi ASN; 4) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan); 5) Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan); 6) Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan);	1) 100%; 2) 97%; 3) 85%; 4) 87%; 5) 75%; 6) 100%;	1) 100%; 2) 90%; 3) 80%; 4) 81%; 5) 8%; 6) 100%;	1) 100%; 2) 93%; 3) 82%; 4) 83%; 5) 15%; 6) 100%;	1) 100%; 2) 92,91%; 3) 82,00%; 4) 92,19%; 5) 33,36; 6) 50,23%	1) 100%; 2) 99,90%; 3) 99,96%; 4) 111,07; 5) 222,4%; 6) 50,23%;	1) 100%; 2) 94%; 3) 83%; 4) 84%; 5) 30%; 6) 100%;	100.00	1) 100%; 2) 48%; 3) 42%; 4) 43%; 5) 30%; 6) 80%;
4 5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100	100	100	100	100	100	104.00	104.00
4 5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2	0	1	1	100	0	1	50.00
4 5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	14	2	2	2	100	2	6	42.86
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	7	1	1	1	100	1	3	42.86
4 5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	7	1	1	1	100	1	3	42.86
4 5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Mutasi dan Promosi ASN	100	100	100	20.00	20	20	104.00	104.00
4 5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	21	3	3	3	100	3	9	42.86
4 5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	14	2	2	2	100	2	6	42.86
4 5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	21	3	3	3	100	3	9	42.86
4 5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	100	80	20	20	100	100	84.00	84.00
4 5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	350	74	50	145	290	50	269	76.86

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100	80	20	20	100	100	84.00	84.00
4 5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	84	12	12	12	100	12	36	42.86
4 5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	700	100	100	65	65	100	165	23.57
4 5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	3400	2882	3000	2828	94.27	94	5,710	67.00
4 5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	21	3	3	3	100	3	9	42.86
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1) Persentase pegawai yang telah memenuhi kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan; 2) Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan; 3) Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal; 4) Persentase Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural;	1) 95% ; 2) 20,5 JP; 3) 6%; 4) 65%;	1) 85% ; 2) 20 JP; 3) 4% ; 4) 0% ;	1) 87% ; 2) 20,1 JP; 3) 5% ; 4) 45% ;	1) 92,91%; 2) 21 JP 3) 5%; 0,28%	1) 106,79%; 2) 104,47 3) 100; 0,62%	1) 89%; 2) 20,2 JP 3) 5,25%; 50%	1) 40%; 2) 20% 3) 2%; 5%	
4 5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase pengembangan Kompetensi Teknis ASN	81	78.00	77	80	104	104	94.00	48.04
4 5 04 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	560	45	80	144	180	80	269	48.04
4 5 04 02 2.02	Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	86	75.00	70.00	75.00	107	60	90.00	36.35
4 5 04 02 2.02 03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	360	40	60	16	27	60	116	32.22

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	42	7	6	4	67	6	17	40.48

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pemerintahan daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara. Dalam mengukur hasil pelayanan yang digunakan indikator kinerja kunci yang sudah ditentukan dalam SPM maupun indikator kunci yang ditetapkan secara mandiri oleh SKPD.

Berikut dapat disajikan capaian indikator kinerja kunci (IKK) dan capaian Kinerja Program Prioritas BKPSDM terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2022.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM
Kota Sungai Penuh

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase Tingkat pelaporan kinerja ASN			100.00	100.00	100.00	100.00		100	100.00	100.00	
2.	Persentase keterisian jabatan			93.00	94.00	95.00	96.00		92,91	94.00	95.00	
3.	Persentase keterpenuhan formasi ASN			82.00	83.00	84.00	85.00		81,97	83.00	84.00	
4.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		✓	83.00	84.00	85.00	86.00		92,19	84.00	85.00	
5.	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		✓	15.00	30.00	45.00	60.00		33,36	30.00	45.00	
6.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		✓	100.00	100.00	100.00	100.00		50.23	100.00	100.00	
7.	Persentase pegawai yang Telah memenuhi kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan			87.00	89.00	91.00	93.00		92,91	89.00	91.00	
8.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan			20.10	20.20	20.30	20.40		21	20.20	20.30	
9.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			5.00	5.25	5.50	5.75		5	5.25	5.50	
10.	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural			45.00	50.00	55.00	60.00		0,28	50.00	55.00	

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

Secara garis besar berikut beberapa isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM Kota Sungai Penuh pada tahun 2022/2023, antara lain :

1. Peningkatan Penerapan Sistem Merit;
2. Optimalisasi Pengelolaan Karir dan Kompetensi;
3. Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Pegawai Negeri Sipil dalam Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian;
4. Tindak Lanjut Penataan ASN sesuai status kepegawaian;
5. Rendahnya Indeks Profesionalitas ASN;
6. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim).

Yang selanjutnya dijabarkan dalam uraian berikut :

A. Administrasi Kepegawaian

1. Peningkatan Penerapan Sistem Merit

Belum maksimalnya penerapan Sistem Merit Manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh dan belum optimalnya penggunaan aplikasi SIPINTER yang dikeluarkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Perlu dilakukan aksi untuk mengoptimalkan penerapan sistem merit pada Pemerintah Kota Sungai Penuh, salah satunya dengan pembentukan tim penilaian mandiri pelaksanaan sistem merit pada Pemerintah Kota Sungai Penuh serta penyusunan Roadmap penerapan sistem merit sebagai bentuk mengoperasionalkan penerapan sistem merit harus sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN.

2. Optimalisasi Pengelolaan Karir dan Kompetensi

Penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya berjalan optimal dan masih berfokus pada pengelolaan administrasi kepegawaian. Selain itu pengelolaan kinerja individu, pengelolaan kompetensi dan pengelolaan karir sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM Aparatur di Kota Sungai Penuh belum berjalan optimal. Sehingga perlu dilakukan perbaikan dan optimalisasi pembuatan kebijakan internal penataan SDM, pembangunan sistem informasi SDM serta optimalisasi pengelolaan karir dan kompetensi dalam rangka menunjang manajemen talenta sesuai dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 30 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil.

3. Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Pegawai Negeri Sipil dalam Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Untuk menyediakan data dan informasi kepegawaian daerah yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebijakan Satu Data sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019. Dalam peningkatan kualitas data dan informasi kepegawaian serta pelayanan administrasi kepegawaian diperlukan pengembangan serta dukungan pendanaan melalui anggaran yang memadai. Selaras dengan

kebijakan penerapan aplikasi Docu Digital pada wilayah kerja Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara dalam waktu mendatang berkas pelayanan kenaikan pangkat PNS dan pengukuran 20 Indeks Profesional ASN untuk semua syarat tidak lagi menggunakan data fisik melainkan digital, kebijakan tersebut menjadi peluang serta potensi bagi BKPSDM Kota Palangka Raya untuk meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian. Adapun pelayanan administrasi kepegawaian BKPSDM Kota Palangka Raya meliputi :

1. Pelayanan Pensiun ASN;
 2. Pelayanan Kenaikan Pangkat ASN;
 3. Pelayanan Mutasi Pindah ASN;
 4. Pelayanan Pemberian / Pengajuan Cuti ASN;
 5. Pelayanan Penugasan ASN Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan;
 6. Pelayanan Data Pegawai;
 7. Pelayanan Penerbitan Kartu Pegawai ASN dan Kartu Suami/ Kartu Istri ASN;
 8. Pelayanan Pengurusan Ijin Belajar, Tugas Belajar dan Pengakuan Gelar;
 9. Pelayanan Konsultasi dan Sosialisasi Dibidang Kepegawaian;
 10. Pelayanan Administrasi Lainnya di Bidang Kepegawaian Sesuai Dengan Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku.
4. Tindak lanjut penataan ASN sesuai dengan status kepegawaian Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK pasal 99 ayat (1) bahwa pegawai Non-ASN yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pada lembaga non struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan Keuangan BLUD, lembaga penyiaran publik dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan 21 Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTN baru sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, masih melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK diundangkan pada tanggal 28 November 2018, maka dengan demikian pemberlakuan 5 (lima) tahun sebagaimana tersebut dalam Pasal 99 ayat (1) jatuh pada tanggal 28 Nopember 2023 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah terdiri dari 2 (dua) jenis kepegawaian yaitu PNS dan PPPK. Selaras dengan hal di atas sesuai dengan Surat Menteri PAN dan RB Nomor : B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka untuk Tahun 2023 terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta SOPD terkait lainnya yaitu :

- a. melakukan pemetaan pegawai non-ASN di Lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi Calon PNS maupun PPPK;
- b. Menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di Lingkungan Instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai Non-ASN;
- c. Dalam hal Instansi Pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui 22 Tenaga Alih Daya (outsourcing) oleh pihak ketiga dan status Tenaga Alih Daya (outsourcing) tersebut bukan merupakan Tenaga Honorer pada instansi yang bersangkutan;
- d. Menyusun Langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi Calon PNS maupun Calon PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 Nopember 2023.

B. Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN

1. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim)

Sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 54 dan pasal 107 bahwa salah satu persyaratan diangkat dalam jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan administrasi harus memiliki Kompetensi Manajerial; salah satunya dibuktikan dengan telah mengikuti dan lulus dalam Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan sesuai dengan tingkatan jabatannya.

Pada Tahun 2022 pada Pemerintah Kota Sungai Penuh hanya bisa mengirimkan 1 orang Pejabat untuk mengikuti Diklatpim III. Inilah yang menjadi permasalahan yang harus dicariikan segera solusinya. Adapun permasalahan adalah keterbatasan anggaran SKPD.

2. Rendahnya Indeks Profesionalitas ASN

Dalam hal menindaklanjuti kebijakan Walikota Sungai Penuh selama mengikuti Pembekalan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan dalam Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, yang dituangkan dalam Rencana Aksi Walikota Sungai Penuh berisi program dan kegiatan terkait Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang berorientasi pada pengembangan dimensi Kompetensi yang diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan, salah satunya dengan pelaksanaa diklat dikalangan ASN. Salah satu langkah yang dianggap tepat dihubungkan dengan upaya peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Kota Sungai Penuh adalah dengan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan salah satunya adalah Diklat PIM II dan Diklat PIM III (PKA) disamping diklat-diklat lainnya.

Pada tahun 2019 dan 2020 Indeks Profesional ASN Kota Sungai Penuh semakin menurun tajam di angka 59,0 dan 21,00 berada pada posisi rentang nilai sangat rendah (sangat tidak profesional) dan pada Tahun 2022 nilai IP ASN Kota Sungai Penuh di angka 28,98. Hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor :

- a. Pelaporan yang tidak terdokumentasikan dengan baik.
- b. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan yang belum terorganisir dengan baik.
- c. Pelaksanaan pendidikan pelatihan yang belum terintegrasi dengan Instansi yang mempunyai tugas pokok dalam hal pengembangan SDM.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi keutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra BKPSDM dan tingkat kinerja yang dicapai oleh BKPSDM, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk BKPSDM berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Rancangan awal RKPD telah memuat rancangan awal program dan kegiatan dan telah disusun melalui proses perencanaan yang dilakukan Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah serta rencana pencapaian tahun 2024. Seiring dengan perkembangan, terjadi proses penyesuaian yang dilakukan SKPD untuk menjawab dinamika yang terjadi. Penyesuaian – penyesuaian yang dilakukan tentunya harus tetap mengacu pada visi, misi Kepala Daerah dan kebijakan yang telah ditetapkan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh setelah melakukan analisis terhadap rancangan awal RKPD yang dikaitkan dengan kebutuhan dan isu/permasalahan terkini melakukan beberapa perubahan/penyesuaian terhadap beberapa program/kegiatan yang tercantum dalam rancangan awal RKPD. Dari hasil review tersebut pada Tahun 2024 dengan jumlah sub kegiatan 42 menjadi 43 sub kegiatan, karena adanya penambahan sub kegiatan dalam rangka peningkatan IP-ASN. Adapun pagu indikatif sesuai dengan Rencana Kerja Awal sebesar Rp. 7.477.979.643,- (Tujuh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) setelah direview menjadi Rp. 9.035.069.930,- (Sembilan milyar tiga puluh lima juta enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah), yaitu antara lain :

Tabel 2.3
 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
 KOTA SUNGAI PENUH

No	Kode	Indikator Kinerja					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan penting
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I 5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				7,477,979,643	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			11,655,811,787	
5 03		KEPEGAWAIAN				7,274,507,061	KEPEGAWAIAN			10,300,782,645	
I 5 03 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sungai Penuh	1) Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja; 2) Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; 3) Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah; 4) Persentase Aparatur BKPSDM yang mengikuti diklat, sosialisasi dan bimtek; 5) Persentase Aparatur BKPSDM yang berkinerja baik	1) 100%; 2) 100%; 3) 100%; 4) 100%; 5) 100%;	5,476,220,579	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1) Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja; 2) Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; 3) Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah; 4) Persentase Aparatur BKPSDM yang mengikuti diklat, sosialisasi dan bimtek; 5) Persentase Aparatur BKPSDM yang berkinerja baik	1) 100%; 2) 100%; 3) 100%; 4) 100%; 5) 100%;	6,967,318,605	
I 5 03 01 2.01	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sungai Penuh	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi SKPD	100%	328,130,220	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi SKPD	100%	328,130,220		

No	Kode	Indikator Kinerja				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sungai Penuh	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	60,500,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	60,500,000	
2	5 03 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Sungai Penuh	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	41,140,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	41,140,000	
3	5 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sungai Penuh	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	113,343,120	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	113,343,120	
4	5 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sungai Penuh	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	113,147,100	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	113,147,100	
II. 5 03 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyusunan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3,837,594,263	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	5,399,919,139	
1	5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sungai Penuh	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang/ Bulan	3,512,031,663	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang/ Bulan	5,074,356,539	
2	5 03 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sungai Penuh	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	71,874,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	71,874,000	
3	5 03 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sungai Penuh	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	143,312,400	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	143,312,400	
4	5 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sungai Penuh	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	86,176,200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	86,176,200	

No	Kode	Indikator Kinerja				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan penting
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	5 03 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan dan Pemeriksaan	Sungai Penuh	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	24,200,000	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan dan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	24,200,000
III	5 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sungai Penuh	Persentase pengadaan pakaian dinas bagi ASN dan Non ASN serta Bimtek/ Sosialisasi dan Diklat	100%	308,317,710	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	308,317,710
1	5 03 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sungai Penuh	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	117,112,710	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	117,112,710 sesuai
5	5 03 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9 Dokumen	40,000,000				40,000,000 sesuai
2	5 03 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sungai Penuh	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	151,205,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	151,205,000 sesuai
IV	5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sungai Penuh	Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	308,787,886	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	308,787,886
1	5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket	12,100,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket	12,100,000
2	5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	43 Paket	30,250,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	43 Paket	30,250,000
3	5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	25,779,050	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	25,779,050
4	5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	15,598,836	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	15,598,836

No	Kode	Indikator Kinerja				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan penting	
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	3 Paket	13,310,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	3 Paket	13,310,000	
6	5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	211,750,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	211,750,000	
V	5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Mitik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sungai Penuh	Persentase Pengadaan Barang Mitik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	335,169,516	Pengadaan Barang Mitik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Mitik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	163,942,750	
1	5 03 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Sungai Penuh	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 Unit	335,169,516	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 Unit	163,942,750	
VI	5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sungai Penuh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	266,260,984	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi dan persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran	100%	266,260,900	
I	5 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	12 Laporan	6,110,500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	12 Laporan	6,110,500	
2	5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	205,700,484	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	205,700,400	
3	5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sungai Penuh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	54,450,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	54,450,000	
VII	5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Mitik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sungai Penuh	Persentase Pemeliharaan Barang Mitik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	91,960,000	Pemeliharaan Barang Mitik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Mitik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	191,960,000	

No	Kode	Indikator Kinerja					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan penting
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sungai Penuh	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	78,650,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	78,650,000	
	5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sungai Penuh	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	13,310,000				13,310,000	
2	5 03 01 2.09 09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Sungai Penuh	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	0	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000	
II	5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Sungai Penuh	Persentase keterisian jabatan Persentase keterpenuhan formasi ASN Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan); Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan); Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Tingkat pelaporan kinerja ASN	1) 91% ; 2) 20.3 JP; 3) 5,5%; 4) 55% ;	1,798,286,482	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase keterisian jabatan Persentase keterpenuhan formasi ASN Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan); Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan); Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Tingkat pelaporan kinerja ASN	1) 91% ; 2) 20.3 JP; 3) 5,5%; 4) 55% ;	3,333,464,040	
I	5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Sungai Penuh	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	964,988,575	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	1,709,526,840	

No	Kode	Indikator Kinerja					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan penting	
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Sungai Penuh		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	753,812,335	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen (penerimaan pppk sebanyak 831, terdiri dari 440 guru, 356 kesehatan&35 teknis)	1,498,350,600	Mengako modir prog. Prioritas RPJMD
2	5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2 Dokumen	75,900,000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2 Dokumen	75,900,000	
3	5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	69,195,500	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	69,195,500	
4	5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Sungai Penuh		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	66,080,740	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	66,080,740	
II	5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Sungai Penuh		Persentase Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN		435,990,673	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN	0%	1,114,762,520	
1	5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Sungai Penuh dan Provinsi Jambi		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	3 Dokumen	48,139,666	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	3 Dokumen	97,061,520	Mengako modir prog. Prioritas RPJMD
2	5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Sungai Penuh		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	70,183,000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	153,522,000	Mengako modir prog. Prioritas

No	Kode	Indikator Kinerja				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan penting	
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Sungai Penuh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen	317,668,007	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen	864,179,000	Mengako modir prog. Prioritas
III	5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Sungai Penuh	Persentase ASN berkembang kompetensinya		144,990,570	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN berkembang kompetensinya	0%	162,720,000	
5	03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Sungai Penuh	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	50 Orang	78,990,570				96,720,000	Mengako modir prog. Prioritas
5	03 02 2.03 13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Sungai Penuh	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	150 orang	66,000,000				66,000,000	
IV	5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sungai Penuh	Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		252,316,664	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	346,454,680	
1	5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sungai Penuh	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	81,759,265	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	134,653,880	Mengako modir prog. Prioritas RPJMD
2	5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Sungai Penuh	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang	58,500,000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang	62,500,000	Mengako modir prog. Prioritas RPJMD
3	5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Sungai Penuh	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	3200 Orang	56,080,000	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	3200 Orang	56,866,800	Mengako modir prog. Prioritas RPJMD
4	5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Sungai Penuh	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	3 Laporan	55,977,399	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	3 Laporan	92,434,000	Mengako modir prog. Prioritas RPJMD
5 04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				203.472.582	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			1,355,029,142	
I	5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Sungai Penuh			203.472.582	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	0	1,355,029,142	
I	5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Sungai Penuh	Persentase pengembangan Kompetensi Teknis ASN		9,618,973	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase pengembangan Kompetensi Teknis ASN	0%	53,334,500	

No	Kode	Indikator Kinerja					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan penting
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5 04 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Sungai Penuh	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	80 Orang	9,618,973	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	80 Orang	53,334,500	Mengako modir prog. Prioritas RPJMD

No	Kode	Indikator Kinerja					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan penting	
		Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
II	5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Sungai Penuh	Persentase Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		193,853,609	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	0%	1,301,694,642		
1	5 04 02 2.02 03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Sungai Penuh	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	60 Orang	9,952,371	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	60 Orang	31,815,000	Mengako modir prog. Prioritas RPJMD	
1	5 04 02 2.02 05	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Sungai Penuh	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	1 Dokumen	0	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	1 Dokumen	32,300,200	Mengako modir prog. Prioritas RPJMD	
2	5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Sungai Penuh	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6 Laporan	183,901,238	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6 Laporan (orientasi pppk sebanyak 831 peserta terdiri dari 440 guru, 356 kesehatan & 35 teknis)	1,237,579,442	Mengako modir prog. Prioritas RPJMD	
JUMLAH						7,477,979,643	JUMLAH				11,655,811,787	

2.5. Penalaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Penalaahan usulan program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh.

Tidak terdapat usulan program maupun kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan program dan kegiatan, karena BKPSDM hanya melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan daerah.

Tabel 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SUNGAI PENUH

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH



3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kota

Sejalan dengan pembangunan aparatur negara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan melanjutkan Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025, berbagai kebijakan ditujukan untuk mewujudkan 8 area perubahan di dalam Reformasi Birokrasi Nasional, meliputi mental aparatur, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan, serta pelayanan publik.

Terwujudnya ASN yang profesional merupakan salah satu prasyarat untuk dapat mewujudkan birokrasi yang berkinerja tinggi, untuk itu diperlukan penguatan manajemen ASN yang profesional berbasis sistem merit. ASN yang profesional, berintegritas, kreatif, inovatif dan netral merupakan salah satu isu strategis dalam area perubahan Reformasi Birokrasi dan menjadi sasaran pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik pada RPJMN tahun 2020-2024.

Sejumlah kebijakan terkait dengan pembangunan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta reformasi birokrasi diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Daerah menjadi salah satu kekuatan dan peluang bagi pemerintah daerah untuk perbaikan manajemen ASN dan 25 manajemen kinerja ASN daerah yang selama ini kualitasnya masih dianggap masih belum sesuai harapan.

Selaras dengan Kebijakan Nasional, Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui RPJMD 2021-2026 telah menetapkan meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur sebagai salah satu sasaran pembangunan, yang kemudian diturunkan ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi tujuan yang akan dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan sasaran strategis meningkatnya profesionalitas ASN pada Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Kebijakan Provinsi yang terkait dengan agenda pembangunan nasional yang signifikan terdapat pada agenda ke 7 (tujuh), yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Adapun arah kebijakan yang ditempuh untuk agenda tersebut meliputi :

1. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah;
2. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional;
3. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN);
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

3.2. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari misi organisasi, dan menjadi ukuran kinerja. Tujuan akan menjadi arah perjalanan organisasi dalam beberapa tahun mendatang. Dengan demikian dalam pernyataan tujuan harus diungkapkan mengenai apa yang akan dicapai dan kapan akan dicapai. Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan atau dicapai dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai.

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026, Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja BKPSDM tahun 2024 adalah sebagai berikut :

3.3. Program Dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran BKPSDM tahun 2024 serta mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan kembali melalui keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Program dan Kegiatan yang menjadi Rencana Kerja BKPSDM Kota Sungai Penuh Tahun 2024 adalah sebagai berikut

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Yang terdiri atas kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

B. Program Kepegawaian Daerah

Yang terdiri dari kegiatan :

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
2. Mutasi dan Promosi ASN;
3. Pengembangan Kompetensi ASN;
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

C. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Yang terdiri dari kegiatan :

1. Pengembangan Kompetensi Teknis
2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

Untuk selanjutnya dapat dilihat pada tabel 3.3.1 berikut :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah (Prioritas pembangunan Kepala Daerah)	Sasaran Daerah (Lihat BAB V RPJMD 2021-2026) sampai Tahun 2022	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2024)										Catatan Verifikasi	Hasil Pembahasan Asistensi I
					Program (BAB VI RPJMD)		Kegiatan		Sub Kegiatan			APBD I	APBD II	DAU	DBHCHT	DAK	APBN	Total		
					Tolok ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok ukur	Target										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
III.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Semua Kec, semua Kelurahan			Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%			184,134,200	184,134,200					184,134,200			
10.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	63,589,200	63,589,200					63,589,200			
11.	Pendataan dan Pengolahan administrasi Kepegawaian								Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9 Dokumen	0	0					0			
12.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	120,545,000	120,545,000					120,545,000			
IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Semua Kec, semua Kelurahan			Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%			305,317,180	305,317,180					305,317,180			
13.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket	10,005,000	10,005,000					10,005,000			
14.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	43 Paket	25,642,280	25,642,280					25,642,280			
15.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	25,779,050	25,779,050					25,779,050			
16.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	12,890,850	12,890,850					12,890,850			
17.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Paket	11,000,000	11,000,000					11,000,000			
18.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	220,000,000	220,000,000					220,000,000			
V.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Semua Kec, semua Kelurahan			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%			127,472,250	127,472,250					127,472,250			
19.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	0					0			
20.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya								Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 Unit	127,472,250	127,472,250					127,472,250			
VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Semua Kec, semua Kelurahan			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				260,726,670	260,726,670					260,726,670			
21.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	12 Laporan	5,036,270	5,036,270					5,036,270			
22.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	210,690,400	210,690,400					210,690,400			
23.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	45,000,000	45,000,000					45,000,000			

Kode	Unsur/Bidang Unsur pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah (Prioritas pembangunan Kepala Daerah)	Sasaran Daerah (Uraian BAB V RPJMD 2021-2026) sampai Tahun 2022	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2024)										Catatan Verifikasi	Hasil Pembahasan Asistensi I
					Program (BAB VI RPJMD)		Kegiatan		Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	DAU	DBHCHT	DAK	APBN	Total			
					Tolok ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok ukur	Target										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
VII.	Penelitian Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah			Semua Kec, semua Kelurahan			<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah</i>				76,000,000						76,000,000			
24.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibiayarkan Pakajnya	5 Unit	65,000,000						65,000,000			
25.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	11,000,000						11,000,000			
26.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	0						0			
II.	PROGRAM KEPEGAWAAN DAERAH	Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur		1) Tingkat pelaporan kinerja ASN; 2) Persentase ketesiran jabatan; 3) Persentase keterpenuhan formasi ASN; 4) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan); 5) Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan); 6) Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan);	1) 100%; 2) 95%; 3) 84%; 4) 85%; 5) 45%; 6) 100%;					1,229,064,078						1,229,064,078			
VIII.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawain ASN			Semua Kec, semua Kelurahan			<i>Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawain ASN</i>	100%			458,640,198						458,640,198			
27.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPK								Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPK	2 Dokumen (CPNS & PPPK)	308,369,708						308,369,708			
28.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian								Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2 Dokumen	58,543,200						58,543,200			
29.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawain								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawain	1 Dokumen	55,890,600						55,890,600			
30.	Pengelolaan Data Kepegawain								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawain	1 Dokumen	35,836,690						35,836,690			
IX.	Mutasi dan Promosi ASN			Semua Kec, semua Kelurahan			<i>Persentase Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN</i>	100%			402,969,200						402,969,200			
31.	Pengelolaan Mutasi ASN								Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	3 Dokumen	52,884,600						52,884,600			
32.	Pengelolaan Kenalkan Pangkat ASN								Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	66,935,600						66,935,600			
33.	Pengelolaan Promosi ASN								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen	283,149,000						283,149,000			
X.	Pengembangan Kompetensi ASN			Semua Kec, semua Kelurahan			<i>Persentase ASN berkembang kompetensinya</i>	72%			65,000,000						65,000,000			
34.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN								Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan	50 Orang	65,000,000						65,000,000			
35.	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN								Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	150 orang	0						0			

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah (Prioritas pembangunan Kepala Daerah)	Sasaran Daerah (lihat BAB V RPJMD 2021-2026) sampai Tahun 2022	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Indikatif (2024)										Catatan Verifikasi	Hasil Pembahasan Asistensi I
					Program (BAB VI RPJMD)		Kegiatan		Sub Kegiatan		APBD I	DAU	DBHCHT	DAK	APBN	Total				
					Tolok ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok ukur	Target										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
XI.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			Semua Kec, semua Kelurahan			Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%			302,454,680						302,454,680			
36.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	110,653,880						110,653,880			
37.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai								Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang	60,500,000						60,500,000			
38.	Pembinaan Disiplin ASN								Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	3200 Orang	50,866,800						50,866,800			
39.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN								Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	3 Laporan	80,434,000						80,434,000			
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										1,230,879,142						1,230,879,142			
III.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur		1) Persentase pegawai yang telah memenuhi kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan; 2) Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan; 3) Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal; 4) Persentase Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural;	1) 91% ; 2) 20.3 JP; 3) 5.5%; 4) 55% ;					1,230,879,142						1,230,879,142			
XII.	Pengembangan Kompetensi Teknis			Semua Kec, semua Kelurahan			Persentase pengembangan Kompetensi Teknis ASN	79%			53,334,500						53,334,500			
40.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum								Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	80 Orang	53,334,500						53,334,500			
XIII.				Semua Kec, semua Kelurahan			Persentase Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	80%			1,177,544,642						1,177,544,642			
41.	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota								Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/kota	60 Orang	31,815,000						31,815,000			
42.	Pelaksanaan Kerjasama antar lembaga								Jumlah Dokumen pelaksanaan kerjasama antar lembaga	1 Dokumen	28,300,200						28,300,200			
43.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan								Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi peserta terdidi dari 440 bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6 Laporan (orientasi 831 peserta terdidi dari 440 guru,356 kesehatan & 35 teknis)	1,117,429,442					1,117,429,442				

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SKPD



Pada bagian bab ini menguraikan tentang rincian kegiatan yang diusulkan didalam renja SKPD Tahun 2024. Program dan kegiatan yang diusulkan telah berpedoman dan sejalan dengan RPJMD Tahun 2021-2026. Pengusulan kegitan yang disampaikan telah didukung oleh indikator dan target yang jelas dan terukur yang dapat mempermudah dalam penganggaran dan telah mepedomasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Jumlah anggaran belanja diluar belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang diusulkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh tahun 2024 sebesar Rp. 3.958.660.520 (Tiga milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah) dengan perkiraan maju pada tahun 2025 sebesar Rp. 4.211.301.563,- (Empat milyar dua ratus sebelas juta tiga ratus seribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dan total anggaran belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh tahun 2024 sebesar Rp. 3.874.482.819,- (Tiga milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dengan perkiraan pada tahun 2025 sebesar Rp. 3.145.202.585,- (Tiga milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), sehingga total anggaran yang diusulkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh tahun 2024 sebesar Rp. 7.833.143.339,- (Tujuh milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan perkiraan pada tahun 2025 sebesar Rp. 7.723.333.326,-. (Tujuh milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah). Semua anggaran bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Adapun rincian kegitan dapat dilihat pada tabel Rencana Kerja (SIPD) dan Rencana Kerja sesuai Permendagri Nomor 050 tahun 2021 yang terdapat pada lampiran dokumen ini.

[illegible]

[illegible]

Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
		Persentase keterlaksanaan jabatan Persentase keterpenuhan formasi ASN Persentase Tingkat pelaporan kinerja ASN Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kependidikan) Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Persentase ASN berkembang kompetensinya	- Kota Sungai Penuh, Sungai Penuh, Semua Kel/Desa	95 % 84 % 100 % 100 % 45 % 85 %	50 Orang 72 %	78.390.570,00 -		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	50 Orang	86.889.627,00	
5	03	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Persentase keterlaksanaan jabatan Persentase keterpenuhan formasi ASN Persentase Tingkat pelaporan kinerja ASN Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kependidikan) Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Persentase ASN berkembang kompetensinya	- Kota Sungai Penuh, Sungai Penuh, Semua Kel/Desa	95 % 84 % 100 % 100 % 45 % 85 %	150 Orang 72 %	66.000.000,00 -	72.650.000,00
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							252.315.664,00	259.579.498,00
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase keterlaksanaan jabatan Persentase keterpenuhan formasi ASN Persentase Tingkat pelaporan kinerja ASN Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kependidikan) Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	- Kota Sungai Penuh, Sungai Penuh, Semua Kel/Desa	95 % 84 % 100 % 100 % 45 % 85 %	12 Dokumen 100 %	81.795.265,00 -	83.022.199,00
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Pekiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target
		Persentase kelengkapan jabatan ASN Persentase keterpenuhan formasi ASN Persentase Tingkat pelaporan kinerja ASN Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	- Kota Sungai Penuh, Sungai Penuh, Semua Kel/Desa	95 % 84 % 100 % 100 % 45 % 85 %	100 Orang	100 %	-	58.500.000,00	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang
5	03	02	04	07	Pembinaan Disiplin ASN							
		Persentase kelengkapan jabatan ASN Persentase keterpenuhan formasi ASN Persentase Tingkat pelaporan kinerja ASN Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	- Kota Sungai Penuh, Sungai Penuh, Semua Kel/Desa	95 % 84 % 100 % 100 % 45 % 85 %	3200 Orang	100 %	-	58.080.000,00	Jumlah ASN yang Mendapat Pembinaan Kedisiplinan	3200 Orang
59.080.000,00												
5	03	02	04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN							
		Persentase kelengkapan jabatan ASN Persentase keterpenuhan formasi ASN Persentase Tingkat pelaporan kinerja ASN Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	- Kota Sungai Penuh, Sungai Penuh, Semua Kel/Desa	95 % 84 % 100 % 100 % 45 % 85 %	3 Laporan	100 %	-	55.977.399,00	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	3 Laporan
57.977.399,00												
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.476.220.579,00		
5.633.943.544,00												
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					328.130.220,00		
361.043.242,00												
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							

[illegible]

Kode	Unsur / Bidang Unsur / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target
		Penyusunan Peraturan SKPSDM yang berkaitan baik	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi SKPD	- Kota Sungai Penuh, Sungai Penuh, Semua Kel.Desa	100 %	7 Laporan	100 %	-		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan
		Penyusunan Peraturan SKPSDM yang mengikuti diklat, sosialisasi dan bimbingan teknis				100 %						
		Penyusunan Peraturan SKPSDM yang menyediakan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa peruntang				100 %						
		Penyusunan Peraturan SKPSDM yang berkaitan dengan pemeliharaan barang milik daerah				100 %						
5	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.837.594.263,00			
						Penyusunan Peraturan SKPSDM yang berkaitan baik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyusunan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan
						Penyusunan Peraturan SKPSDM yang mengikuti diklat, sosialisasi dan bimbingan teknis			3.512.031.663,00			
						Penyusunan Peraturan SKPSDM yang menyediakan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa peruntang						
						Penyusunan Peraturan SKPSDM yang berkaitan dengan pemeliharaan barang milik daerah						
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Penyusunan Peraturan SKPSDM yang berkaitan baik	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyusunan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
						Penyusunan Peraturan SKPSDM yang mengikuti diklat, sosialisasi dan bimbingan teknis			71.874.000,00			
						Penyusunan Peraturan SKPSDM yang menyediakan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa peruntang						
						Penyusunan Peraturan SKPSDM yang berkaitan dengan pemeliharaan barang milik daerah						
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Pemertanahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							

Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana			
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
			Persentase Aparatur SKPSDM yang berkinerja baik Persentase Aparatur SKPSDM yang mengikuti diklat, sosialisasi dan bimtek Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa peruntjang urusan pemerintahan daerah Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Penelaahan dan Pengujian Lembar Keuangan SKPD	Persentase penyusunan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kota Surgal Penuh, Surgal Penuh, Semua KaiDesa	100 % 100 % 100 % 100 %	2 Dokumen	100 %	143.312.400,00	-	Jumlah Dokumen Pe nelaahan dan Pengujian Lembar Keuangan SKPD	12 Doku men	157.643.640,00	
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Persentase Aparatur SKPSDM yang berkinerja baik Persentase Aparatur SKPSDM yang mengikuti diklat, sosialisasi dan bimtek Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa peruntjang urusan pemerintahan daerah Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penyusunan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kota Surgal Penuh, Surgal Penuh, Semua KaiDesa	100 % 100 % 100 % 100 %	- Laporan	100 %	86.176.200,00	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Keuangan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	94.793.020,00	
5	03	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tanggapan Pemeriksaan										
			Persentase Aparatur SKPSDM yang berkinerja baik Persentase Aparatur SKPSDM yang mengikuti diklat, sosialisasi dan bimtek Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa peruntjang urusan pemerintahan daerah Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persentase penyusunan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kota Surgal Penuh, Surgal Penuh, Semua KaiDesa	100 % 100 % 100 % 100 %	2 Dokumen	100 %	24.201.000,00	-	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokum en	26.620.000,00	
5	03	01	2.05	02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
			Persentase Aparatur SKPSDM yang berkinerja baik Persentase Aparatur SKPSDM yang mengikuti diklat, sosialisasi dan bimtek Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa peruntjang urusan pemerintahan daerah Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persentase penyusunan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kota Surgal Penuh, Surgal Penuh, Semua KaiDesa	100 % 100 % 100 % 100 %	-	100 %	308.317.710,00	-			317.192.032,00	

[illegible]

Kode	Unsur / Bidang Unsur / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Aparatur SKPSDM yang berkinerja baik Persentase Aparatur SKPSDM yang mengikuti pelatihan, sosialisasi dan timbal balik Persentase ketersediaan layanan capaian kinerja pelayanan administrasi kepegawalan, administrasi umum dan jasa perunjangan urusan pemerintahan daerah Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Paket: Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Sungai Penuh, Sungai Penuh, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 %	7 Paket	100 %	12.101.000,00	-	Jumlah Paket: Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket: 13.310.000,00	

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
				Persentase Aparatur SKPSDM yang berkinerja baik Persentase Aparatur SKPSDM yang mengikutidiklat, sosialisasi dan timtek Persentase keteresediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa perunjangan Persentase pemeliharaan daerah Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Sungai Penuh, Sungai Penuh, Senua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	5 Paket	100 %	15.593.836,00	-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	17.158.720,00
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
				Persentase Aparatur SKPSDM yang berkinerja baik Persentase Aparatur SKPSDM yang mengikutidiklat, sosialisasi dan timtek Persentase keteresediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa perunjangan Persentase pemeliharaan daerah Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Sungai Penuh, Sungai Penuh, Senua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 %	3 Dokumen	100 %	13.310.000,00	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	14.641.000,00
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
				Persentase Aparatur SKPSDM yang berkinerja baik Persentase Aparatur SKPSDM yang mengikutidiklat, sosialisasi dan timtek Persentase keteresediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa perunjangan Persentase pemeliharaan daerah Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Sungai Penuh, Sungai Penuh, Senua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 %	20 Laporan	100 %	211.750.000,00	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	232.925.000,00
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
5	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
											335.169.516,00				718.686.468,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Target Capaian Kinerja		Kebijakan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Target	
		Persentase Aparatur BKPSDM yang berkinerja baik	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Hasil Kegiatan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
		Persentase Aparatur BKPSDM yang mengikuti akhlak, sosialisasi dan timbrek										
		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja										
		Persentase ketersediaan layanan administrasi										
		kepegawalan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah										
		Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah										
5	03	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya							
					Persentase Aparatur BKPSDM yang berkinerja baik	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Hasil Kegiatan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					Persentase Aparatur BKPSDM yang mengikuti akhlak, sosialisasi dan timbrek							
					Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja							
					Persentase ketersediaan layanan administrasi							
					kepegawalan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah							
					Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah							
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
					Persentase Aparatur BKPSDM yang berkinerja baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil Kegiatan	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah				
					Persentase Aparatur BKPSDM yang mengikuti akhlak, sosialisasi dan timbrek							
					Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja							
					Persentase ketersediaan layanan administrasi							
					kepegawalan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah							
					Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah							
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
					Persentase Aparatur BKPSDM yang berkinerja baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil Kegiatan	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah				
					Persentase Aparatur BKPSDM yang mengikuti akhlak, sosialisasi dan timbrek							
					Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja							
					Persentase ketersediaan layanan administrasi							
					kepegawalan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah							
					Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah							

[illegible]

Kode		Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025											
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)							
									Program				Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target					
			Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persentase pegawai yang telah memenuhi kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan Persentase Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Persentase Sertifikasi, Kelengkapan, Kompetensi Manajerial dan Fungsional	- Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5,50 % 91 % 55 % 20,3 JP	1 Dokumen	80 %	50.000.000,00	-	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	1 Dokumen	60.000.000,00								
5	04	02	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase Sertifikasi, Kelengkapan, Kompetensi Manajerial dan Fungsional	- Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5,50 % 91 % 55 % 20,3 JP	6 Laporan	80 %	133.901.235,00	-	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6 Laporan	125.154.634,00								
TOTAL										7.755.782.119,00												

BAB V PENUTUP



Demikian Rencana Kerja BKPSDM Kota Sungai Penuh Tahun 2024 disusun sebagai sebuah dokumen perencanaan tahunan dalam rangkaian fungsi manajemen pembangunan daerah Kota Sungai Penuh, catatan yang perlu menjadi perhatian dalam proses manajemen selanjutnya yaitu

1. Memperhatikan antara konsistensi perencanaan dan penganggaran;
2. Menekankan konsep *money follow program* (pendekatan penganggaran yang berdasarkan pada bobot program/kegiatan yang memberikan kemanfaatan tinggi bagi masyarakat dengan memastikan bahwa hanya program yang bermanfaat yang benar-benar dialokasikan;
3. Peningkatan Sistem Pengendalian Intern;
4. Selalu lakukan monitoring dan evaluasi secara teratur dan;
5. Lakukan perbaikan berkelanjutan untuk peningkatan kualitas kinerja pelayanan dalam rangka meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi melalui meningkatnya profesionalitas ASN Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja BKPSDM Kota Sungai Penuh Tahun 2024 selanjutnya akan menjadi dokumen sumber sebagai pedoman, arah serta acuan dalam penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring proses dan kinerja pembangunan yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kota Sungai Penuh selama Tahun 2024.

Sungai Penuh, 2023
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SUNGAI PENUH

NINA PASTIAN, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP. 19760831 200604 2 011